

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, K. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Ladang Kata, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Vol. 1. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Astuti, Mulia. (2013) *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. P3KS Press, Jakarta.
- Atmoko, D., & Ahmad Baihaki. (2020). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.
- Desminar. (2021). *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. UMSB Press, Padang.
- Fikri, F., & Muchsin, A. (2022). *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.
- Eleanora, F. N., & SH, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media, Bojonegoro.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika hukum keluarga Islam di indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Irwansyah. (2023). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jamaluddin, & Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press, Lhokseumawe.

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- Naily, N., et al. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Soekanto, S., & Sri Mamudji. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sururie, R. W. (2023). *Putusan pengadilan*. CV. Mimbar Pustaka, Bandung.
- Syaifuddin, M., Sri Turatmiyah., & Annalisa Yahanan. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Tim Redaksi Tatanusa, dkk. (2011). *Kesatuan Naskah Undang-Undang Pelaku Kekuasaan Kehakiman*. Tatanusa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Convention on the Rights of the Child*, 1989.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75 Tahun 1959.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP

D. Jurnal

Aditiawan, F. P., & Anggriawan, T. P. (2020, November). Aplikasi Hukum Perkawinan Berbasis Android. In *Prosiding Seminar Nasional Informatika Bela Negara (SANTIKA)*, 1, 40-44. DOI: <https://doi.org/10.33005/santika.v1i0.12>

Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 1-14. DOI:

<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.272>

Ali, S. H., Syarifuddin, S., & Susilawati, S. (2024). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 116/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 5(3), 233-251.

Chusnida, N. L., & Anggriawan, T. P. (2022). Dispensation of Marriage in The Perspective of Children's Rights: Best Interest of The Children. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 295-310. DOI: <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.295-310>

Devy, S. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*. 2(1), 124-138. DOI: <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>

Djuli, S.H. (2025). Konvergensi hukum negara dan syariat: Membaca ulang pengaturan nafkah anak setelah perceraian. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(2), 197–207. DOI: <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1362>

Fajri, I., Murjani, M., & Haries, A. (2022). Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 260-267. DOI: <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.326>

- Farhan, M., Eficandra, E., & Efendi, R. (2020). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto. *Jurnal Imiah Syariah IAIN Batusangkar* *Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2), 245-263.
- Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan asas kepentingan terbaik anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151–161. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>
- Hidayatullah, M. Y., & Mustafa, A. D. (2024). Penambahan nafkah anak pasca perceraian perspektif teori keadilan Gustav Radbruch. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 48–63. DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>
- Kasrulloh, & Ernawati. (2025). Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1991–1999. DOI: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1392>
- Kurniawan, M. B. (2017). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. *Journal of Ham*, 8(1), 67-78.
- Mastur Ali, Sirajuddin Sirajuddin, & Sulton Miladianto. (2025). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS: (Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(3), 106–135. DOI: <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4804>

- Muchlis, A. (2024). Penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66-77.
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata (Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), 1–12.
- Paputungan, S. H., Aling, D. F., & Soputan, M. (2025). Analisis yuridis nafkah lahir batin anak pasca perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(3).
- Saputra, A., & Mulyadi, M. T. (2022). Pelaksanaan hak asuh anak atas penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2(1), 1–13.
- Solihin, R. A. (2020). Perlindungan terhadap pemenuhan nafkah anak dalam pelaksanaan putusan perceraian di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Law and Islamic*, 2(1), 126-153.
- Syafiuddin, M. N. (2022). Aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan nafkah sebagai upaya penjaminan hak asasi anak. *Jurnal Ham*, 13(2), 235-252.

Zahira, A. S. (2025). Optimalisasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian: Perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 163–174. DOI: <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>

E. Tugas Akhir

Az-Zahra, S. (2025). *Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian (Studi Putusan Nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto.

Fahrezi, E. A. (2024). *Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Perspektif Efektivitas Hukum*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Latumahina, R. E. (2019). *Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perlindungan hukum anak luar kawin*. Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Nurhidayat. (2024). *Perbedaan putusan hakim mengenai penetapan besaran nafkah anak pasca perceraian (Studi Putusan No.420/Pdt.G/2023/PA.Agm dan No.15/Pdt.G/2023/PTA.Bn.)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

F. Website

Ensiklopedia mengenal Islam. (2012).

https://ia801209.us.archive.org/15/items/KumpulanFIQIH_201510/Ensiklopedia%20Fiqih.pdf diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

Istiqomah Sinaga, “Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia” , diakses pada 4 Februari 2026, dari <https://pa-tanjungselor.go.id/artikel-pengadilan/969-pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia>

Widyakso, R. (2018). *Tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat.* <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.